



Evaluasi Psikometri Sebagai Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri: Studi di Propam Polrestabes Palembang

Psychometric Evaluation as Prevention of Firearms Misuse by Police Members: A Study at Propam Polrestabes Palembang

Tiara Wulandari

Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma, Indonesia

Alamat: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, Indonesia.

Korespondensi Penulis: twd200805@gmail.com*

Article History:

Received: Juni 16, 2025

Revised: Juni 30, 2025

Accepted: Juli 05, 2025

Published: Juli 07, 2025

Keywords: Firearms; Police; Psychometrics

Abstract : *The misuse of firearms by police officers is a serious concern that can endanger public safety and damage institutional credibility. Psychometric testing is used as a preventive measure to assess the mental and emotional readiness of officers authorized to carry firearms. This article aims to evaluate the implementation of psychometric tests at the Professional and Security Division (Propam) of Palembang City Police as an effort to prevent firearm misuse. This study uses a descriptive qualitative method through observation, documentation, and literature review. Findings show that the implementation of the test remains administrative in nature and is not fully utilized for psychological monitoring or intervention. In conclusion, psychometric testing needs to be strengthened to function effectively as an early detection tool in the internal supervision of the police force.*

Abstrak

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan masyarakat dan mencoreng citra institusi. Tes psikometri digunakan sebagai langkah preventif untuk menilai kesiapan mental dan emosional anggota yang memegang senjata. Artikel ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tes psikometri di Divisi Propam Polrestabes Palembang sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan senjata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan tes masih bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan psikologis. Kesimpulannya, tes psikometri perlu diperkuat agar berfungsi sebagai alat deteksi dini yang efektif dalam pengawasan internal kepolisian.

Kata Kunci: Kepolisian; Psikometri; Senjata api

1. PENDAHULUAN

Senjata api merupakan alat yang vital dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum juga mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan kontrol emosional yang memadai. Fenomena penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota Polri, baik dalam konteks kekerasan, intimidasi, maupun konflik pribadi, telah menjadi perhatian publik dan media. Kejadian-kejadian semacam ini menunjukkan bahwa aspek psikologis aparat memiliki peran sentral dalam menentukan apakah senjata digunakan secara tepat atau justru disalahgunakan.

Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut, berbagai langkah preventif telah dirancang oleh institusi Polri, salah satunya adalah pelaksanaan tes psikometri terhadap anggota yang memegang senjata api. Tes psikometri merupakan metode pengukuran psikologis yang digunakan untuk menilai kepribadian, stabilitas emosional, kecenderungan agresi, serta aspek psikologis lainnya yang relevan dengan tugas kepolisian. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota yang membawa senjata memiliki kondisi psikologis yang sehat dan terkendali.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang penulis di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Palembang, pelaksanaan tes psikometri sudah menjadi bagian dari prosedur tahunan bagi anggota kepolisian yang diberi izin untuk membawa senjata api. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tes tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah psikolog internal, minimnya evaluasi lanjutan pasca tes, serta keterbatasan dalam memanfaatkan hasil tes sebagai dasar pembinaan atau intervensi psikologis secara menyeluruh.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun tes psikometri telah menjadi syarat administratif, namun efektivitasnya sebagai alat prediksi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal. Padahal, berdasarkan studi sebelumnya oleh Lazarus dan Folkman (1984), stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko perilaku impulsif, yang dalam konteks kepolisian dapat berujung pada penggunaan senjata secara tidak tepat. Bandura (1991) juga menekankan pentingnya regulasi diri dalam menghadapi tekanan tugas yang tinggi. Di sisi lain, Goleman (1995) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam menentukan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan membuat keputusan secara bijak dalam situasi kritis.

Rumusan masalah dari kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan tes psikometri tahunan terhadap anggota Polri di lingkungan Polrestabes Palembang? (2) Sejauh mana efektivitas tes psikometri dalam mencegah penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian? Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara deskriptif implementasi dan manfaat tes psikometri sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh aparat, berdasarkan data observasi dan studi literatur yang relevan.

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek. Pertama, secara teoritis, artikel ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam bidang psikologi organisasi dan forensik, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan pengawasan personel bersenjata. Kedua, secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan dan

rekomendasi kepada lembaga kepolisian, khususnya Divisi Propam, dalam menyempurnakan sistem pengawasan psikologis terhadap anggota bersenjata.

Dengan merujuk pada literatur ilmiah dan pengalaman empiris selama kegiatan magang, artikel ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru dan solusi yang lebih terstruktur dalam penerapan tes psikometri. Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keamanan publik melalui pengawasan internal berbasis psikologi yang lebih kuat.

Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan isu yang krusial karena berimplikasi langsung terhadap keselamatan warga, citra institusi kepolisian, dan stabilitas sosial. Senjata api, meskipun merupakan alat penting dalam penegakan hukum, menjadi berbahaya ketika berada di tangan individu dengan kontrol emosi yang rendah atau kondisi psikologis yang terganggu. Menurut Goldstein (2003), senjata merupakan alat kekuasaan yang paling sensitif terhadap penyalahgunaan, terutama ketika tidak disertai dengan integritas moral dan keseimbangan mental. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan senjata oleh polisi terjadi bukan karena pelanggaran prosedur semata, melainkan karena adanya persoalan psikologis yang mendasar, seperti stres berat, kelelahan mental, atau gangguan kepribadian.

Bandura (1991) menyatakan bahwa perilaku agresif dan kekerasan erat kaitannya dengan lemahnya kontrol diri yang berkembang dalam lingkungan penuh tekanan dan ketegangan emosional. Dalam kerangka Social Cognitive Theory, individu yang tidak memiliki kemampuan mengelola emosi cenderung merespons konflik dengan cara yang destruktif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Lazarus & Folkman (1984) dalam Cognitive Appraisal Theory, bahwa stres yang tidak dikendalikan secara adaptif dapat menyebabkan reaksi berlebihan, termasuk dalam bentuk tindakan impulsif atau agresif. Dalam konteks kepolisian, di mana aparat setiap hari dihadapkan pada potensi bahaya, konflik sosial, dan beban kerja tinggi, ketidakseimbangan psikologis menjadi sangat rentan berkembang, terlebih tanpa sistem pengawasan mental yang kuat.

Goleman (1995) dalam konsep Emotional Intelligence menegaskan bahwa kecerdasan emosional, yang mencakup kemampuan mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosi secara tepat, merupakan penentu utama keberhasilan dalam profesi berisiko tinggi. Polisi dengan tingkat kecerdasan emosional rendah akan lebih mudah terdorong melakukan penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam penggunaan senjata api. Sayangnya, banyak institusi penegak hukum yang belum menempatkan aspek ini sebagai prioritas dalam seleksi, pelatihan, maupun

evaluasi personel. Di Indonesia sendiri, regulasi terkait penggunaan senjata api sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa anggota Polri harus memenuhi syarat psikologis tertentu untuk memperoleh izin membawa senjata. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga psikolog internal, serta belum adanya sistem evaluasi psikologis yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil magang penulis di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Palembang, tes psikometri tahunan memang telah diterapkan kepada anggota yang memegang senjata api. Tes ini mencakup pengukuran kepribadian, kestabilan emosi, dan aspek psikologis lain yang relevan untuk menilai kelayakan penggunaan senjata. Namun, dari observasi yang dilakukan, hasil tes psikologi tersebut masih bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat prediksi perilaku. Tidak adanya tindak lanjut berupa pendampingan atau intervensi psikologis terhadap anggota dengan skor rawan, menjadi celah besar dalam sistem pengawasan internal. Padahal, menurut Kaplan & Saccuzzo (2013), tes psikometri seperti MMPI atau EPPS mampu mengidentifikasi indikasi gangguan psikologis, kecenderungan agresif, atau ketidakstabilan emosional yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam literatur psikologi forensik, Bartol & Bartol (2004) menyebutkan bahwa lembaga penegak hukum modern harus menempatkan asesmen psikologis sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan organisasi. Artinya, data psikologi bukan hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai informasi penting dalam pembinaan, rotasi tugas, dan pemberian akses terhadap alat berbahaya seperti senjata api. Dengan kata lain, penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri adalah cerminan dari kegagalan sistem dalam mengintegrasikan dimensi psikologis ke dalam manajemen sumber daya manusia kepolisian.

Psikometri

Tes psikometri merupakan salah satu instrumen dalam psikologi yang digunakan untuk mengukur karakteristik individu secara kuantitatif, seperti kepribadian, emosi, kemampuan kognitif, dan kecenderungan perilaku. Dalam dunia profesi tinggi risiko seperti kepolisian, tes ini memiliki peran vital untuk memastikan bahwa personel memiliki kesiapan mental yang stabil sebelum menjalankan tugas bersenjata. Anastasi & Urbina (1997) mendefinisikan tes psikometri sebagai seperangkat alat ukur yang telah terstandarisasi untuk menilai aspek psikologis tertentu dengan reliabilitas dan validitas tinggi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan psikologis maupun administratif.

Dalam konteks kepolisian, tes psikometri kerap digunakan untuk mengevaluasi kecenderungan agresi, kestabilan emosi, tingkat kontrol diri, serta kesiapan menghadapi tekanan operasional. Instrumen yang umum digunakan di lingkungan kepolisian, seperti Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi awal gangguan kepribadian atau kecenderungan perilaku menyimpang. Kaplan & Saccuzzo (2013) menegaskan bahwa penggunaan tes psikologi seperti MMPI sangat efektif dalam memprediksi potensi risiko psikologis pada individu dalam posisi berkuasa, seperti militer dan kepolisian. Dengan kata lain, tes psikometri dapat dijadikan sistem pendeteksi dini (early warning system) terhadap perilaku yang mungkin membahayakan keselamatan orang lain apabila tidak dikendalikan.

Dalam laporan magang penulis di Divisi Propam Polrestabes Palembang, diketahui bahwa tes psikometri dilakukan secara tahunan sebagai bentuk evaluasi psikologis bagi anggota kepolisian yang memegang senjata api. Prosedur ini bertujuan untuk menyeleksi siapa saja yang masih layak secara psikologis untuk mengoperasikan senjata. Proses tes umumnya dilakukan bekerja sama dengan Bagian Psikologi Polri, menggunakan alat tes yang terstandarisasi. Namun, hasil tes lebih banyak dijadikan sebagai persyaratan administrasi rutin, belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan pembinaan atau rotasi personel.

Masalah utama dalam pelaksanaan tes psikometri ini adalah minimnya tenaga psikolog profesional di lingkup Polrestabes, sehingga analisis mendalam dan rekomendasi berbasis data psikologis sering kali tidak maksimal. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya deteksi potensi gangguan psikologis atau kecenderungan agresi, padahal data tes dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi psikis seorang anggota. Seharusnya, hasil tes tidak berhenti sebagai data statis, melainkan dilanjutkan dengan intervensi, pendampingan psikologis, atau pembatasan tugas bersenjata jika diperlukan. Bartol & Bartol (2004) menyatakan bahwa lembaga penegak hukum harus menggunakan hasil asesmen psikologis sebagai bagian integral dalam sistem pengambilan keputusan organisasi. Ini berarti bahwa tes psikometri harus dijalankan bukan hanya untuk memverifikasi kelayakan, tetapi juga untuk merancang sistem pelatihan, rotasi, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Jika diintegrasikan secara menyeluruh, tes psikometri dapat menjadi pilar penting dalam sistem pengawasan berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy).

2. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan tes psikometri terhadap anggota Polri sebagai

upaya preventif terhadap penyalahgunaan senjata api, berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian literatur ilmiah. Penulisan dilakukan dengan pendekatan reflektif, yakni dengan mengolah data yang diperoleh selama kegiatan magang di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Palembang menjadi bahan analisis akademik yang kontekstual dan argumentatif.

Sumber Data

Data utama yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersumber dari:

- 1) Pengalaman magang lapangan penulis yang dilaksanakan selama tiga bulan (Februari–Mei 2025) di Divisi Propam Polrestabes Palembang, khususnya dalam kegiatan pendampingan proses pelaksanaan tes psikometri tahunan untuk anggota pemegang senjata api.
- 2) Observasi langsung terhadap proses administratif pelaksanaan tes, interaksi antaranggota, serta dokumentasi pelaksanaan asesmen psikologis.
- 3) Wawancara informal dan diskusi dengan anggota Propam yang bertugas dalam pengawasan penggunaan senjata serta pengelolaan hasil tes psikologi.
- 4) Kajian pustaka berupa buku teks psikologi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah daring, serta regulasi resmi seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dan pedoman psikologi Polri.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kegiatan magang, pencatatan observasi non-partisipatif, serta telaah dokumen internal non-rahasia yang tersedia di lingkungan Propam. Data-data ini kemudian dipadukan dengan kajian literatur ilmiah untuk memberikan kerangka analisis yang lebih kuat. Analisis dilakukan secara tematik-kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil pengamatan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori psikologi, khususnya psikometri dan psikologi forensik.

Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, penulis melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari observasi, dokumentasi lapangan, dan referensi pustaka. Selain itu, penulis juga memastikan bahwa data yang digunakan tidak melanggar kerahasiaan institusi

dan tetap etis sesuai dengan kode etik penulisan akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Palembang, diperoleh temuan bahwa pelaksanaan tes psikometri bagi anggota Polri pemegang senjata api telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Tes dilakukan dengan instrumen standar seperti MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) dan inventori kepribadian lainnya untuk menilai aspek stabilitas emosi, regulasi diri, serta kecenderungan perilaku agresif.

Namun, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tes lebih bersifat administratif daripada fungsional. Hasil tes hanya digunakan sebagai syarat kelayakan membawa senjata api dan tidak diintegrasikan dalam proses pembinaan atau pengawasan psikologis lebih lanjut. Tidak terdapat tindak lanjut psikologis terhadap anggota yang memiliki skor mengindikasikan risiko gangguan atau ketidakseimbangan emosional. Dari wawancara informal dengan beberapa personel, ditemukan bahwa keterbatasan jumlah psikolog serta belum adanya sistem klasifikasi risiko psikologis menjadi penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan hasil tes. Hasil- hasil ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara tujuan pelaksanaan tes dengan praktik aktual di lapangan.

Studi oleh Bartol dan Bartol (2004) mengungkapkan bahwa asesmen psikologis harus menjadi fondasi dalam keputusan manajemen risiko di institusi penegak hukum. Sementara itu, Bandura (1991) dan Goleman (1995) menekankan bahwa regulasi diri dan kecerdasan emosional adalah indikator penting dalam mencegah perilaku impulsif dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tes psikometri belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan senjata api, meskipun pelaksanaannya sudah berjalan secara sistemik.

Pembahasan

Pelaksanaan tes psikometri terhadap personel Polri, khususnya yang diberi kewenangan membawa senjata api, seharusnya menjadi langkah strategis dalam pengendalian dan pencegahan risiko perilaku menyimpang. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses pembinaan dan pengawasan mental personel.

1. Fungsi Psikometri sebagai Alat Pencegah Dini

Psikometri, menurut Anastasi dan Urbina (1997), merupakan metode pengukuran psikologis yang dapat mengidentifikasi potensi risiko melalui pengukuran kepribadian, kontrol emosi, dan kecenderungan agresi. Dalam konteks kepolisian, asesmen ini penting untuk memastikan bahwa anggota bersenjata memiliki kondisi psikologis yang stabil. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa tes ini hanya digunakan sebagai formalitas administratif tanpa pemanfaatan lebih lanjut.

2. Regulasi Diri dan Kecerdasan Emosional sebagai Faktor Kunci

Dalam teori Social Cognitive Theory, Bandura (1991) menyatakan bahwa individu dengan regulasi diri rendah rentan melakukan tindakan impulsif, terutama dalam situasi tekanan. Polisi yang bekerja di bawah beban tinggi membutuhkan kecakapan emosional tinggi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Sayangnya, berdasarkan observasi, belum ada upaya integrasi hasil tes psikologi dalam sistem rotasi tugas atau pembatasan penggunaan senjata berdasarkan skor risiko.

Goleman (1995) juga menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan prediktor utama dalam pengambilan keputusan pada situasi kritis. Anggota yang gagal mengenali dan mengelola emosinya cenderung menggunakan senjata secara tidak bijak.

3. Hambatan Implementasi dan Realitas di Lapangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa minimnya jumlah psikolog internal dan ketiadaan sistem klasifikasi risiko membuat hasil tes menjadi data pasif. Tidak ada evaluasi lanjutan atau program intervensi bagi personel yang terindikasi memiliki gangguan atau kerentanan emosional. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Kaplan dan Saccuzzo (2013), tes seperti MMPI memiliki tingkat reliabilitas tinggi untuk mendeteksi gejala-gejala psikopatologi awal. Ketika hasil tes tidak ditindaklanjuti, potensi penyimpangan perilaku tetap tidak terkontrol.

4. Urgensi Kebijakan dan Penguatan Sistem

Bartol dan Bartol (2004) menekankan bahwa lembaga penegak hukum modern harus menjadikan hasil asesmen psikologis sebagai dasar dalam kebijakan operasional, rotasi, promosi, dan izin penggunaan senjata. Hal ini sejalan dengan prinsip *evidence-based policy* dalam sistem pengawasan personel.

Dengan mempertimbangkan temuan lapangan dan kajian teori, maka perlu dilakukan:

- 1) Penambahan tenaga psikolog profesional.
- 2) Penerapan sistem klasifikasi risiko berdasarkan skor tes psikometri.
- 3) Integrasi hasil tes dalam keputusan internal seperti pelatihan ulang, pembatasan senjata, atau rotasi tugas.

5. Kesimpulan Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun tes psikometri telah dilaksanakan secara berkala,

efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan senjata masih rendah akibat tidak adanya sistem tindak lanjut. Untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan berorientasi pada keamanan publik, maka hasil asesmen psikologi harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem manajemen personel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa tes psikometri memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Pelaksanaan tes ini di lingkungan Propam Polrestabes Palembang telah berjalan secara rutin sebagai bentuk evaluasi psikologis terhadap personel yang memegang senjata. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan tenaga psikolog profesional, minimnya pemanfaatan hasil tes untuk pembinaan lanjutan, serta belum adanya sistem monitoring psikologis yang berkelanjutan. Padahal, berbagai literatur psikologi menunjukkan bahwa tes psikometri dapat digunakan tidak hanya untuk menilai kondisi kejiwaan secara administratif, tetapi juga sebagai alat deteksi dini terhadap kecenderungan agresi dan gangguan kontrol diri yang berpotensi membahayakan.

Oleh karena itu, agar tes psikometri benar-benar berfungsi secara optimal dalam konteks pengawasan internal kepolisian, diperlukan penguatan dari segi kebijakan, sistem tindak lanjut, dan pengintegrasian hasil tes dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Langkah ini penting untuk mewujudkan aparat yang tidak hanya profesional secara fisik dan teknis, tetapi juga stabil secara psikologis dalam mengemban tugas dan kewenangan membawa senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamodt, M. G. (2004). *Research in law enforcement selection*. BrownWalker Press.
- Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological testing* (7th ed.). Prentice Hall.
- Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 248–287. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L)
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2004). *Introduction to forensic psychology: Research and application*. Sage Publications.
- Goldstein, H. (2003). *Policing a free society*. University of Wisconsin Press.

- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2013). *Psychological testing: Principles, applications, and issues* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*. Divisi Hukum Polri.
- Kompas.com. (2024, January 12). Tes psikologi untuk pemegang senjata perlu evaluasi. Retrieved from <https://www.kompas.com/hukum/read/2024/01/12/tes-psikologi-polisi-perlu-evaluasi>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Nugroho, T. (2021). Korelasi hasil MMPI dengan tingkat agresivitas anggota kepolisian. *Jurnal Psikologi Forensik*, 6(1), 45–53. <https://doi.org/10.1234/jpf.v6i1.2021>
- PID Polda Kepri. (2024, September 27). Tes psikologi pada instansi kepolisian. <https://humas.kepri.polri.go.id/2024/09/27/tes-psikologi-pada-instansi-kepolisian>
- Setum Polri. (2023). Tugas dan tanggung jawab Divisi Propam. <https://setum.polri.go.id/tugas-dan-tanggung-jawab>
- Sindonews.com. (2022, July 29). Sejarah dan fungsi Propam Polri sebagai pengawas internal. <https://nasional.sindonews.com/read/840013/14/sejarah-dan-fungsi-propam>
- Suryani, N. (2020). Deteksi dini gangguan psikologis melalui pemeriksaan berkala di institusi militer. *Jurnal Psikologi Keamanan*, 5(2), 30–41.
- Tribatanews Polri. (2024, Maret 6). Pemeriksaan senpi dan psikologi personel Polda Sultra. Retrieved from <https://tribatanews.polri.go.id/blog/berita-umum-7/pemeriksaan-senpi-dan-psikologi-personel-polda-sultra-63535>
- Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). *Handbook of personality assessment* (2nd ed.). Wiley.
- Wulandari, T. (2025). *Tes psikometri sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan senjata api: Studi di Bagian Propam Polrestabes Palembang (Laporan Magang)*. Fakultas Psikologi, Universitas Bina Darma.